

TEORI AKUNTANSI CASE STUDY (Pertemuan 5)

Nama :Revalina

Npm :2413031053

Kelas :2024B

Pertanyaan :

1. Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.
2. Bandingkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:
 - Tujuan laporan keuangan
 - Karakteristik kualitatif informasi
 - Basis pengukuran
 - Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
3. Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.

Jawaban :

1. Keputusan yang diambil oleh PT Garuda Sejahtera untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran bisa menjadi objek kajian serta diterima secara konseptual berdasarkan kerangka konsep PSAK dan IFRS di Indonesia. Secara ringkas, nilai wajar diartikan sebagai jumlah uang yang akan diperoleh atau dibayarkan dalam transaksi pasar yang teratur antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus pada tanggal pengukuran. Dalam kerangka PSAK 68 dan IFRS 13, penggunaan nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan karena mencerminkan kondisi pasar yang terbaru.

Kerangka konseptual PSAK menyoroti pentingnya relevansi dan refleksi sebagai dua kriteria utama dalam pengukuran, dan nilai wajar memenuhi keduanya jika ada

dukungan dari data pasar yang sah dan metode pengukuran yang sesuai. IFRS 13 juga menetapkan pedoman rinci untuk pengukuran nilai wajar, termasuk hirarki input yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam proses penentuan nilai tersebut. Di Indonesia, keberlakuan penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran oleh PT Garuda Sejahtera sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengukur nilai wajar dengan akurat menggunakan data pasar yang valid dan metode pengukuran yang sesuai standar. Praktek ini sudah menjadi kewajiban dalam pelaporan keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia serta entitas-entitas yang bersangkutan, sebagaimana terlihat dalam laporan keuangan terbaru yang secara konsisten mengadopsi PSAK dan IFRS.

Namun, kritik mungkin muncul berkaitan dengan tantangan dalam mengukur nilai wajar, terutama untuk aset atau liabilitas yang tidak memiliki pasar aktif, yang dapat menghasilkan subjektivitas dalam penentuan nilainya. Selain itu, nilai wajar dapat menyebabkan fluktuasi pada laporan keuangan, yang bisa mengakibatkan interpretasi yang berbeda di antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, meskipun keputusan untuk menggunakan nilai wajar dapat diterima secara konseptual, perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal yang ketat dan melakukan pengungkapan yang memadai untuk memastikan transparansi dan akurasi catatan tersebut.

Secara keseluruhan, pilihan PT Garuda Sejahtera untuk mengadopsi nilai wajar sejalan dengan prinsip dasar pelaporan keuangan yang menekankan relevansi, pembubaran informasi, dan kemampuan untuk membandingkan, semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip PSAK 68 dan IFRS 13 serta didukung oleh data pasar yang valid dan metode pengukuran yang tepat. Kesesuaian ini mendukung laporan keuangan yang memberikan gambaran ekonomi yang paling akurat dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan di Indonesia.

2. Perbandingan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:

Aspek	Kerangka Konseptual PSAK	Kerangka Konseptual IFRS
Tujuan Laporan Keuangan	Menyediakan data keuangan mengenai entitas yang penting bagi para investor, pemberi pinjaman, dan	Sama, yaitu menawarkan data keuangan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh para investor,

	pemangku kepentingan lain dalam membuat keputusan ekonomi.	pemberi pinjaman, serta pihak luar lainnya.
Karakteristik Kualitatif Informasi	Menyoroti pentingnya relevansi, konsistensi (keandalan), netralitas, kemampuan untuk dibandingkan, dan kesinambungan agar data menjadi bermanfaat dan dapat diandalkan.	Sama halnya, dorongan untuk relevansi, kejelasan (representasi yang setia), netralitas, keterbandingan, serta konsistensi bertujuan untuk memperbaiki mutu informasi keuangan.
Basis Pengukuran	Kombinasi antara biaya yang telah terjadi dan nilai wajar, yang bergantung pada relevansi dan kejelasan data pasar, sesuai dengan PSAK, khususnya PSAK 68 mengenai nilai wajar.	Menyoroti pentingnya nilai wajar sebagai dasar utama dalam pengukuran apabila ada pasar yang aktif, selain penggunaan biaya yang telah terjadi jika nilai wajar sulit untuk diukur secara tepat, seperti yang diatur dalam IFRS 13.
Asumsi Entitas dan Kelangsungan Usaha	Mengaplikasikan asumsi kelangsungan usaha dan entitas ekonomi yang membedakan entitas tersebut dari pemilik dan pihak lainnya, serta unit moneter sebagai dasar untuk pengukuran dan pelaporan	Serupa, menggunakan ketidakpastian dalam usaha, entitas ekonomi, dan unit moneter; laporan dari entitas akan terus berfungsi dalam periode yang wajar dan disusun berdasarkan asumsi ini.

- Indonesia sebaiknya tidak secara penuh mengadopsi kerangka IFRS tanpa melakukan penyesuaian untuk konteks lokal, mengingat ada berbagai faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar yang perlu diperhatikan. Dari segi ekonomi, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kompleksitas yang ada dalam standar IFRS, terutama mengenai penilaian nilai wajar dan pengungkapan yang ketat. Pelaksanaan IFRS secara menyeluruh dapat menimbulkan biaya tinggi dan tantangan teknis yang tidak sebanding dengan manfaat langsungnya bagi sebagian besar perusahaan di pasar domestik.

Dalam aspek sosial dan budaya, kebiasaan bisnis di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan negara maju. Pemahaman dan kemampuan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang diberikan juga bervariasi. IFRS yang lebih bersifat prinsip dan fleksibel namun kompleks, mungkin sulit untuk diakses secara efektif oleh beberapa pelaku usaha dan pengguna lokal tanpa adanya bantuan atau penyesuaian.

Tingkat perkembangan pasar modal dan sistem akuntansi di Indonesia masih dalam proses pertumbuhan. Banyak entitas dan otoritas yang masih beradaptasi dengan standar internasional yang selalu berubah. Dengan melakukan penyesuaian lokal terhadap IFRS melalui PSAK, Indonesia dapat menjalani proses konvergensi secara bertahap yang lebih realistis, turut mengakomodasi kondisi dan kebutuhan lokal, sambil tetap meningkatkan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, PSAK telah banyak mengadopsi prinsip dasar IFRS dengan memperhitungkan aspek lokal, sehingga menghasilkan standar yang relevan dan praktis di pasar Indonesia. Ini menjadikan proses harmonisasi standar lebih efisien dibandingkan menerapkan IFRS secara langsung tanpa modifikasi. Secara keseluruhan, penerapan IFRS secara penuh tanpa penyesuaian tidaklah ideal bagi Indonesia yang masih memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar. Pendekatan konvergensi yang bertahap dan memperhatikan keadaan lokal sangat penting untuk menciptakan standar akuntansi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan realitas bisnis di Indonesia.